# **BAB IPENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam ruang lingkup internasional, setiap negara tentu memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Hal ini sangatlah penting guna mencapai kesejahteraan dan cita-cita dari negara itu sendiri. Perbedaan strategi dan kebijakan inilah yang menciptakan suasana kerjasama internasional menjadi beragam dan dinamis. Namun, di sisi lain perbedaan ini terkadang menimbulkan suatu permasalahan atau konflik antar negara. Sebagai contoh, kebijakan *Belt Road Initiative* (BRI) yang diterapkan oleh pemerintah China. Dengan BRI, China bertujuan untuk mengubah lanskap ekonomi dan geopolitik Eurasia dan Samudra Hindia dengan gelombang investasi infrastruktur yang belum pernah terjadi sebelumnya.  (Smith, 2018).

Kebangkitan China di awal tahun 2000-an meningkatkan aktivitas negara tersebut dalam organisasi internasional. Selain memperluas kegiatannya di organisasi internasional yang sudah mapan, China juga menjadi Inisiator beberapa organisasi internasional. Salah satu organisasi internasional yang diprakarsai China adalah Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). Didirikan pada tahun 2000, organisasi ini beranggotakan China dan 49 negara Afrika dan bersifat informal. Alasan China mendirikan FOCAC adalah karena China memiliki kepentingan ekonomi di kawasan Afrika dan bersaing dengan negara lain untuk mempromosikan kepentingan tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, China menyusun FOCAC sebagai organisasi internasional informal. Hal ini menunjukkan bahwa sifat organisasi internasional informal yang memberikan fleksibilitas, otonomi negara, manajemen informasi, pengurangan biaya transaksi jangka pendek, dan minimisasi birokrasi lebih baik mampu memfasilitasi China untuk mencapai kepentingan geo-ekonominya di wilayah Afrika.

Sebagaimana pada pertemuan KTT FOCAC tingkat Menteri ke-5 di China pada juli 2012. Sebuah proposal enam poin untuk memperdalam kemitraan strategis jenis baru ditawarkan oleh China kepada anggota FOCAC. Yang mana proposal tersebut ditujukan untuk mempromosikan pengembangan kemitraan strategis China-Afrika jenis baru yang mempersentasikan kesetaraan politik dan rasa saling percaya, kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan dan pertukaran budaya, deklarasi tersebut menyarankan kedua belah pihak untuk lebih memperkuat konsultasi politik dan dialog strategis, meningkatkan tinggi- kunjungan tingkat, meningkatkan berbagi pengalaman dalam pemerintahan, dan menghormati dan mendukung kepentingan inti satu sama lain mengenai berbagai masalah termasuk kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah dan lainnya (Xinhua, 2012). Hal ini menjadi salah satu pintu masuknya China untuk membuat pelabuhan militer guna menjaga keamanan jalur logistiknya dari kejahatan laut.

Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan luar negeri China berkembang pesat dengan proyeknya yaitu *Belt Road Initiative*. BRIadalah program ambisius untuk menghubungkan Asia, Afrika dan Eropa melalui jaringan darat dan laut dengan tujuan untuk meningkatkan integrasi regional, meningkatkan perdagangan, dan merangsang ekonomi. Inisiatif ini terdiri dari dua komponen utama, “Sabuk Ekonomi Jalur Sutra” (SREB) berbasis darat dan “Jalur Sutra Maritim” (MSRI) yang berbasis di laut.

Pada komponen *Maritime Silk Road Initiative* (MSRI) atau Jalur Sutera Maritim adalah sebuah rencana pembangunan besar yang bertujuan untuk meningkatkan serta konektivitas maritim antara China, Asia Tenggara dan Selatan, Afrika Timur, dan Eropa, sebagai bagian dari proyek payung *Belt Road Initiative* (Grieger, 2018). Konektivitas pelabuhan di bawah MSRI merupakan aset geostrategis yang penting yang memproyeksikan model pembangunan dan tata kelola negara pada skala global. Yang mana pelabuhan menjadi inti dari MSRI, sehingga memungkinkan China untuk mengejar dua hal untuk mengakses pelabuhan luar negeri untuk penggunaan pada aspek sipil dan militer.

Melalui kerja sama regional, Jalur Sutera Maritim dapat memainkan peran penting bagi pembangunan di kawasan maritim berdasarkan kerja sama keuangan, pembangunan substruktur, dan program pertukaran. Tujuan dari strategi Jalur Sutera Maritim yang baru ini adalah untuk meningkatkan perdagangan dan kerjasama ekonomi yang lebih besar dalam proyek-proyek untuk meningkatkan perdagangan lintas laut di wilayah tersebut.

Khususnya di benua Afrika. Salah satu daerah di mana China telah membuat terobosan signifikan adalah Djibouti, sebuah negara kecil yang berlokasi di Tanduk Afrika. Djibouti adalah negara kecil di Tanduk Afrika, yang mana hampir keseluruhan relevansi Djibouti di panggung dunia berasal dari lokasi geografisnya, yang berbatasan dengan Laut Merah dan Teluk Aden, dan ini merupakan daya utama Djibouti atas negara lain yang bersaing memperebutkan satu sumber daya berharga utamanya yaitu: pelabuhan. Pelabuhan utamanya bertanggung jawab atas perdagangan dalam jumlah besar (World Bank, 2019). Misalnya, selama bertahun-tahun hampir 100 persen ekspor Ethiopia telah melalui Djibouti (Derso, 2018).

**Gambar 0.1 Map of Djibouti**



**Sumber: Nations Online Project**

Kerangka konstitusi Djibouti tidak mengadopsi konstitusi sampai tahun 1992, 15 tahun setelah mencapai kemerdekaan. Sebelumnya, negara ini diperintah oleh sembilan pasal konstitusi yang telah diadopsi pada tahun 1981. Berdasarkan konstitusi, presiden, yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih dengan hak pilih universal untuk masa jabatan lima tahun, tanpa batasan apa pun. pada jumlah istilah yang dilayani. Presiden mencalonkan dan dibantu oleh seorang perdana menteri. Majelis Nasional adalah lengan legislatif pemerintah dan terdiri dari 65 anggota yang dipimpin oleh perdana menteri. Anggota majelis dipilih dengan hak pilih universal untuk jangka waktu lima tahun. Amandemen konstitusi pada tahun 2010 mengatur pembentukan Senat, meskipun tidak segera dibentuk.

Dari tahun 1981 hingga 1992 Djibouti memiliki sistem partai tunggal, dengan Majelis Rakyat untuk Kemajuan (Rassemblement Populaire pour le Progrès; RPP) menjadi satu-satunya partai hukum. Selama ini wakil-wakil Majelis Nasional hanya dapat dipilih dari daftar yang disediakan oleh RPP; abstain dari pemungutan suara adalah satu-satunya bentuk oposisi yang sah (C, 2023).

Konstitusi 1992 secara resmi meresmikan sistem politik multipartai yang mengizinkan persaingan antara empat partai politik. Meskipun itu merupakan penyimpangan yang signifikan dari aturan partai tunggal tahun 1977–1992, para kritikus mencatat bahwa Djibouti sebagian besar tetap merupakan sistem politik partai tunggal de facto, dengan partai yang berkuasa mempertahankan kekuasaan yang luas. Pada tahun 2002 pembatasan jumlah partai dicabut, memungkinkan pembentukan banyak partai politik baru yang diakui secara hukum.

Djibouti memiliki sedikit sumber daya alam dan memiliki kapasitas terbatas untuk kegiatan pertanian dan industri. Pemerintah terus berfokus pada layanan terkait keuangan, telekomunikasi, dan perdagangan, memperkuat posisi negara sebagai pusat bisnis dan perdagangan regional yang penting di Tanduk Afrika. Akibatnya, perekonomian sangat bergantung pada sektor jasa, yang menyumbang sekitar empat per lima dari produk domestik bruto negara tersebut (C, 2023).

Djibouti sebagai pusat perdagangan regional dibangun di atas pelabuhan internasional modernnya dan rel kereta api Djibouti–Addis Ababa. Jaringan jalan Djibouti terdiri dari sekitar 2.000 mil (3.000 km) jalan. Jalur kereta api Djibouti–Addis Ababa secara historis merupakan sumber pendapatan penting bagi Djibouti. Dibangun pada awal abad ke-20, dimiliki bersama oleh pemerintah Djibouti dan Ethiopia dan ditingkatkan dengan dukungan keuangan dari Uni Eropa. Meskipun perbaikan ini, bagaimanapun, jalur terus memburuk, mempengaruhi lalu lintas penumpang dan barang. Akhirnya rel kereta api tidak digunakan lagi, tetapi jalur rel listrik baru dibangun sejajar dengan jalur yang ada. Dibiayai sebagian besar oleh Bank Ekspor-Impor China, proyek senilai $3,4 miliar ini selesai pada Oktober 2016. Mampu menampung kereta barang dengan kecepatan hingga 75 mil (120 km) per jam dan kereta penumpang dengan kecepatan hingga 100 mil ( 160 km) per jam, jalur rel listrik berjanji akan sangat mengurangi waktu transit antara Addis Ababa dan kota Djibouti (C, 2023).

Pelabuhan Djibouti adalah zona perdagangan bebas dengan fasilitas peti kemas dan pendingin modern serta jalur kereta api ke Ethiopia. Pelabuhan internasional menyediakan kemampuan untuk bunkering dan pengiriman barang ke negara lain di kawasan ini. Upaya diversifikasi—termasuk pembangunan terminal peti kemas baru, perbaikan tempat berlabuh, dan peresmian pelabuhan baru dengan fasilitas peti kemas laut dalam dan terminal minyak dan gas di dekat Doralé—telah berpusat pada menangkap pangsa pasar dunia yang lebih besar. pengiriman barang di sepanjang Laut Merah dan Teluk Aden.

Hal ini berfungsi untuk mendorong Djibouti menggandakan investasi pelabuhan. Djibouti juga menyewakan tanah ke negara lain seperti Amerika Serikat, China, Prancis, dan Jepang, yang memungkinkan mereka untuk melancarkan operasi militer sambil berkerumun di sekitar ibu kota Djibouti (Fujiwara, 2018). Lokasi Djibouti berfungsi sebagai katalis dalam membuat Djibouti secara strategis penting bagi Amerika Serikat terutama karena tiga alasan utama: fasilitasi operasi militer Djibouti, dampak ekonominya, dan hubungannya dengan China. Kebijakan pertahanan luar negeri China di Djibouti berpampak pada implikasinya terhadap keamanan jalur sutera maritim Afrika. Sehingga, dapat dilihat kepentingan ekonomi dan strategis China di Djibouti, termasuk kehadiran militernya dan implikasinya terhadap stabilitas Kawasan tersebut. Pada akhirnya, hal ini akan menyoroti pentingnya kebijakan China untuk keamanan di wilayah Afrika Timur.

Hal ini dimulai ketika tahun 2013, Presiden China Xi Jinping mengajukan "*Belt and Road Initiative"* (BRI) bertujuan membangun platform baru untuk kerja sama untuk pembangunan bersama. Sejak saat itu, BRI telah membuka jalur pembangunan bagi negara-negara mitra di sepanjang rute yang dilaluinya. China dan Djibouti telah menandatangani perjanjian baru di bawah kerangka *Belt and Road Initiative.* Pengumuman itu dikeluarkan pada saat Presiden China Xi Jinping bertemu dengan Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh di Beijing pada hari Minggu, menjelang KTT Forum Kerjasama China-Afrika (FOCAC) Beijing. Yang mana Xi mengatakan bahwa penandatanganan dokumen antara kedua belah pihak dapat memberikan dorongan baru untuk kerja sama. Tentang pengalaman tata kelola dan pembangunan, Xi mengatakan China bersedia memperkuat pertukaran dan saling pengertian dengan Djibouti dan memperdalam kerjasama kemanusiaan (CGTN, 2018a).

Hububungan antara FOCAC dan BRI sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden China Xi Jinping pada saat menyampaikan pidato saat menghadiri KTT Forum Kerjasama China-Afrika (FOCAC) Beijing pada September 2018. FOCAC menawarkan landasan kebijakan China terhadap Afrika, dan BRI membahas lebih banyak tentang platform dan konektivitas multilateral, yang berarti BRI diharapkan dapat membawa Afrika ke pasar dunia yang lebih luas (CGTN, 2018c).

BRI yang diajukan China mendapatkan momentum di Afrika melalui jejak infrastrukturnya seperti Addis Ababa-Djibouti *Standard Gauge Railway.* Proyek kereta api transnasional ini sepanjang 752 km, yang diluncurkan pada Oktober 2016, adalah proyek unggulan kerja sama China-Afrika di bawah BRI, menyatukan Ethiopia, Djibouti, dan China untuk tujuan Bersama, yaitu menuju realisasi jaringan kereta api berkecepatan tinggi terintegrasi di Afrika (Xinhua, 2022b).

Pada 21 Januari 2016, Kementerian Luar Negeri China mengumumkan kesepakatan dengan Djibouti untuk menjadi tuan rumah pangkalan pertamanya di luar Laut China Selatan. Hal ini di umumkan oleh Presiden Ismail Omar Guelleh dari Djibouti bahwa serangkaian perjanjian telah ditandatangani dengan pihak China untuk membentuk zona perdagangan bebas, memperluas peran Djibouti untuk transshipment barang dalam perdagangan antara China dan dunia. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan tentang pembangunan fasilitas logistik di Djibouti, yang akan memungkinkan pasukan China untuk melaksanakan misi pengawalan dengan lebih baik dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di Kawasan (Ministry of Foreign Affairs, 2016). Yang mana hal ini merupakan kebijakan dari MSRI.

Pada saat ini, China sedang mengejar agenda ambisius untuk mengubah dirinya menjadi pusat perdagangan komersial untuk kawasan Tanduk Afrika. Hal ini membuat china semakin memainkan peran di Djibouti. Keterlibatan China mempunyai banyak segi, mulai dari investasi infrastruktur besar hingga pendirian pangkalan militer untuk pertama kalinya di luar negeri di Djibouti pada tahun 2017. China menganggap Djibouti sebagai bagian dari Inisiatif Sabuk dan Jalannya. Hal ini membuat Amerika Serikat telah menyuarakan keprihatinan tentang peran China di Djibouti, mengingat kepentingan strategis AS di kawasan itu dan kedekatan pangkalan China dengan fasilitas militer Amerika Serikat di sana (Secretary et al., 2019). Pembangunan pangkalan militer merupakan salah satu implementasi dari kebijakan FOCAC dalam mengatasi keamanan maritim.

Yang mana hal ini juga terlihat dalam beberapa tahun terakhir, Djibouti telah secara aktif berpartisipasi dalam BRI, bekerja dengan China dalam proyek infrastruktur dan perdagangan yang sesuai dengan rencana "Visi Djibouti 2035" untuk memberikan peran penuh pada keunggulan geografis unik bangsa dan untuk mencapai tujuan negara. Duta Besar China untuk Djibouti, Hu Bin mengatakan kepada Xinhua bahwa selain pelabuhan, Djibouti *International Free Trade Zone* (DIFTZ) buatan China yang secara resmi dibuka pada September 2018 telah menjadi platform penting untuk transformasi ekonomi Djibouti (Xinhua, 2022a).

China memiliki motivasi nyata untuk memperluas kehadiran militernya di Afrika Timur. Hal ini telah menjabarkan tujuan dasar China dalam membangun kehadiran militer dan pangkalan pendukung di sepanjang Jalur Sutra Maritim. Hal ini sesuai dengan kesimpulan Lim Joo-Jock mengenai strategi geostrategis, yang menyatakan bahwa sebaiknya “digunakan dalam kerangka regional yang lebih terbatas, di mana secara ringkas faktor-faktor geografis berinteraksi untuk mempengaruhi atau memberi keuntungan kepada salah satu lawan, atau campur tangan. untuk memodifikasi perencanaan strategis serta upaya politik dan militer." Pertimbangan militer berbentuk kekuatan tunggal yang difokuskan untuk mencapai tujuan nasional sehubungan dengan negara lain. Dalam hal signifikansi militer, strategi mengacu pada operasi atau upaya yang terorganisir dan menyeluruh untuk mencapai tujuan penting atau memperoleh sumber daya penting. (Priyono, 2020).

Hal ini dikarenakan Djibouti secara strategis terletak di selat Bab el Mandeb, yang mana menjadi sebuah lokasi chokepoint antara Laut Merah dan Teluk Aden. Lokasi ini telah menjadi pusat militer asing dalam dekade terakhir, menampung pangkalan untuk Amerika Serikat, Prancis, Jepang, Italia, dan, yang terbaru yaitu China. Djibouti begitu menarik bagi kekuatan militer global. Stabilitas politik Djibouti di wilayah yang bergejolak memiliki kepentingan strategis yang besar. Selain itu, ini adalah salah satu rute maritim tersibuk di dunia. Disisi lain, kedekatan Djibouti dengan daerah yang bergejolak di Timur Tengah dan Afrika menjadikannya lokasi yang sempurna untuk pangkalan militer.

Hal yang mendasari bagi Amerika Serikat dan sekutunya, pangkalan di Djibouti memungkinkan jalur mudah ke Afrika dan Timur Tengah, memungkinkan operasi terkait Perang Global Melawan Teror. Yang mana Djibouti telah menjadi rumah bagi pangkalan militer sejak lama, menjadikan mereka mitra yang dapat diandalkan. Pangkalan militer di negara itu sebagian besar digunakan sebagai titik transit pasokan yang menuju operasi di bagian lain Afrika dan Timur Tengah. Penyewaan tanah untuk keperluan militer adalah garis hidup ekonomi utama Djibouti.

Hal ini dapat terlihat dari Amerika Serikat telah mendapatkan sewa sepuluh tahun untuk pangkalan militer utama di Djibouti yang diandalkannya untuk meluncurkan misi kontra terorisme, termasuk serangan pesawat tak berawak, di Yaman dan Tanduk Afrika. Berdasarkan perjanjian tersebut, Washington akan membayar $63 juta per tahun untuk sewa sepuluh tahun, dengan opsi untuk memperpanjang pengaturan selama satu dekade lagi. Kesepakatan baru menunjukkan peningkatan besar dalam sewa, karena AS dilaporkan membayar $38 juta per tahun di bawah sewa saat ini (aljazeera, 2014).

Seperti yang di ungkapkan oleh Presiden Amerika serikat saat itu Barack Obama “*Camp Lemonnier is extraordinarily important to our work throughout the Horn of Africa but also throughout the region. We very much appreciate the hospitality that Djiboutians provide,”* (aljazeera, 2014). Hal ini menunjukan bahwa pentingnya Djibouti, terkait dalam kemitraan strategis untuk menangani perang melawan terorisme, pembajakan, dan perdagangan manusia

Faktor yang mendasari Djibouti menyewakan tanah yaitu faktor ekonomi. Layanan pelabuhan dan penyewaan tanah untuk pangkalan pasukan asing memberikan porsi yang signifikan dari dukungan ekonomi Djibouti. Pemerintah Djibouti telah menetapkan tahun 2035 sebagai tenggat waktu untuk memenuhi tujuannya untuk berkembang menjadi pusat perdagangan dan logistik penting di Afrika (Ethiophia, n.d.). Perekonomian Djibouti sangat bergantung pada perdagangan melalui kompleks pelabuhan internasionalnya yang sibuk, dan keuntungan dari pelayaran dan sewa lahan merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah (Secretary et al., 2019).

Selain itu, Djibouti dari sisi geografis cukup strategis dan bermanfaat bagi pelabuhan-pelabuhan, sehingga menjadi lokasi yang paling mungkin bagi PLAN untuk mengembangkan semacam infrastruktur pendukung tetap di wilayah tersebut. Meskipun disisi lain, perlu juga dicatat bahwa pelabuhan-pelabuhan tersebut adalah yang paling sering digunakan oleh Amerika Serikat dan kapal-kapal angkatan laut lainnya di wilayah tersebut, dengan membuat pengembangan fasilitas dukungan militer yang ekstensif dan eksplisit di wilayah tersebut.

Keterlibatan China di Djibouti juga merupakan simbol pergeseran kebijakan luar negeri yang lebih luas. Pada Forum Kerjasama China-Afrika (FOCAC) 2018, China mengumumkan pembentukan Dana Perdamaian dan Keamanan China-Afrika dan berjanji akan mendanai inisiatif untuk menjaga perdamaian, memerangi pembajakan, dan memerangi terorisme. Kehadiran angkatan laut China di Teluk Aden, di mana ia telah memainkan peran penting dalam upaya multinasional untuk melawan pembajakan Somalia, sudah ada sejak satu dekade lalu. Djibouti telah menjadi simpul pemasok utama untuk operasi tersebut. Yang mana Waldhauser memperkirakan pada awal 2018 bahwa Djibouti berutang setidaknya $1,2 miliar ke China. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat AS bahwa negara tersebut mungkin semakin rentan terhadap pengaruh atau manipulasi China (Secretary et al., 2019).

Pada Konferensi Tingkat Menteri Forum Kerjasama China-Afrika (FOCAC) ke-8 diadakan di Dakar, Senegal, dari tanggal 29-30 November 2021. Pada pasal 7.2 Kerja Sama Maritim, pertemuan tersebut menghasilkan China akan, di bawah prinsip ketulusan, kesetaraan, saling menguntungkan dan hasil yang saling menguntungkan, melakukan kerja sama dengan negara-negara Afrika di bidang-bidang seperti penelitian ilmiah maritim, pengamatan dan pemantauan laut, perlindungan lingkungan laut, dan penelitian Antartika dan dukungan logistik, memajukan pembangunan Jalur Sutera Maritim Abad ke-21, dan memberikan kontribusi positif untuk tata kelola kelautan global (Ministry of Foreign Affairs, 2021). Hal ini semakin menguatkan kepentingan politik China di Djibouti.

Disisi lain, lokasi pangkalan ini juga mendukung untuk mengumpulkan intelijen pada kegiatan militer internasional lainnya. Hal ini menungkinkan dengan adanya Camp Lemonnier US AFRICOM, pusat utama operasi militer AS di Afrika. Ini adalah satu-satunya pangkalan permanen AS di Afrika. Hal itu diperbaharui pada tahun 2001 dan masih aktif sampai sekarang di Bandara internasional Dijibouti-Ambouli Dijibouti. Yang Kamp ini dapat menampung sekitar 4.000 personel militer dan sipil pasukan gabungan dan sekutu serta kontraktor Departemen Pertahanan AS sambil menyediakan lapangan kerja bagi 100 pekerja negara regional dan negara ketiga. Camp Lemonnier mempertahankan layanan tingkat tinggi dalam mendukung kesiapan tempur dan keamanan kapal, pesawat, detasemen, dan personel untuk persyaratan komando regional dan kombatan sambil juga melengkapi operasi di Tanduk Afrika sambil tetap mendorong hubungan positif AS-Bangsa Afrika (Miltery bases.com, 2018).

Pada kamp ini, terdapat juga satuan tugas gabungan Tanduk Afrika (CJTF-HoA) salah satunya prancis. Yang mana Prancis memiliki 1.450 personel militer, yang merupakan pusat stabilitas Djibouti, hal ini dikarena perjanjian pertahanan dinegosiasikan dengan negara bagian Djibouti pada kemerdekaannya pada tahun 1977. Dengan misi yang kompleks, termasuk pertempuran udara antara pasukan Prancis, serta misi serangan jarak jauh, dukungan tembakan dari udara ke darat, dan pengintaian.

Kamp Lemonnier menampung spesialis intelijen sipil dan militer serta komando teater Africom. Beberapa antena yang terlihat membuktikan operasi jenis ini. Pemisahan lalu lintas pesawat dari awak UAV diputuskan setelah beberapa kecelakaan UAV di landasan pacu bandara sipil Djibouti, membatasi lalu lintas sipil dan militer. Oleh karena itu, sangat sulit untuk mendapatkan gambaran akurat tentang aktivitas Reaper oleh USAF di Djibouti. Prancis dan Amerika adalah dua negara paling ekspedisi di dunia saat ini, dan jelas keduanya siap untuk berbuat lebih banyak (Jean-Marc Tanguy, 2022).

Dengan hadirnya pangkalan militer China di Selat Bab-el-Mandeb, posisi pangkalan ini dapat memberikan fungsi intelijen yang paling penting. Keuntungan yang menguntungkan untuk mengamati lalu lintas militer dan komersial melalui *chokepoint* global yang penting ini. Pangkalan tersebut menjadi aset yang berguna untuk pengumpulan intelijen, proyeksi kekuatan regional, dan untuk mempertahankan kehadiran regional PLA yang terus berkembang. Pangkalan baru ini juga menandai perubahan strategis dalam metode dukungan PLAN untuk armada laut jauh.

Dengan pembangunan pelabuhan komersial yang bermitra dengan pemerintah Djibouti, dan berpuncak pada pembangunan pangkalan militer, China mengembangkan titik kuat strategis luar negeri pertamanya di Djibouti. Sementara keadaan yang mengarah pada pendirian pangkalan militer resmi dan khusus di Djibouti mungkin ditiru di lokasi lain, pangkalan itu harus dianggap sebagai salah satu simpul penting dalam jaringan fasilitas pelabuhan luar negeri yang muncul yang melayani tujuan strategis dan komersial.

Salah satu tanda pertama bahwa suatu negara memiliki kepentingan maritim yang meningkat adalah peningkatan pengeluaran untuk pertahanan maritim. Selama tiga dekade terakhir, 'PLAN' bertambah jumlahnya dan semakin menjadi lebih modern dan profesional, sambil memperluas cakupan operasinya (Hlongwa, 2020). Pada akhirnya, pemeliharaan kekuatan militer di luar negeri bergantung pada kemampuan ekonomi jangka panjang di dalam negeri. Dengan demikian, pertanyaan apakah China akan dapat terus memperluas kehadiran militer di luar negeri dalam waktu satu dekade akan sangat bergantung pada keputusan kebijakan dalam negeri yang akan dibuat oleh para pemimpin China antara sekarang dan nanti.

Selain Djibouti, proyek MSRI ini juga berlangsung di Kyaukpyu (Myanmar), Hambantota (Sri Lanka), Gwadar (Pakistan), dan Chabahar (Iran). Salah satunya pada proyek pengembangan pelabuhan Gwadar adalah elemen kunci dari Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) yang mana merupakan proyek unggulan dari BRI. Ini berbicara tentang kekuatan hubungan China-Pakistan dan jangkauan strategi besar China (Styan, 2020).

Saat ini sedang dikembangkan, Pelabuhan Gwadar terletak dekat dengan mulut Teluk Persia dan di bawah Selat Hormuz. Setelah Karachi dan Qasim, itu adalah pelabuhan komersial ketiga di Pakistan. Bersama-sama, dua pelabuhan yang lebih tua menangani 95 persen perdagangan melalui laut Pakistan. Pelabuhan Gwadar sedang dibangun secara bertahap. (Styan, 2020).

Dalam strategi besar China, Gwadar merupakan pijakan penting yang merupakan bagian dari rangakian strategi untuk Indo Pasifik. Gwadar merupakan potensi titik strategis yang berpeluang dapat berfungsi sebagai platform utama untuk interaksi ekonomi, diplomatik, dan militer China di seluruh wilayah Samudra

Selain itu, tindakan negara-negara besar lainnya di kawasan ini, terutama Amerika Serikat. Tentunya China tidak akan menghabiskan 10 tahun ke depan beroperasi dalam ruang hampa, dan tindakan China hampir pasti akan menimbulkan tanggapan politik, diplomatik, dan ekonomi yang signifikan di pihak kekuatan lain. Misalnya, jika Amerika Serikat melihat kehadiran militer China yang signifikan di Djibouti sebagai masalah serius, mereka dapat dengan mudah terlibat dalam kebijakan yang diperhitungkan untuk mengembangkan pelabuhan-pelabuhan utama dan membentuk hubungan strategis dengan negara-negara utama. China kemungkinan akan mencari kehadiran militer yang diperluas, tetapi banyaknya hambatan strategis, politik, dan potensi lainnya (Clemens, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas bagaimana kebijakan pertahanan China di Djibouti mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan Afrika Timur dengan mengevaluasi dan menganalisis uraian di atas, dengan judul **" PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BRI CHINA MELALUI FOCAC DI DJIBOUTI”**

## 1.2 Pembatasan Masalah

Masalah tersebut harus dipersempit oleh penulis dengan latar belakang penelitian yang telah dibahas di atas agar pembahasan penelitian ini lebih tepat sasaran. Penulis memfokuskan penelitian pada bagaimana strategi pertahanan China melalui FOCAC pada proyek MSRI dapat berkontribusi dalam memenuhi kepentingan China di Afrika Timur. Agar tidak terlalu melenceng dari inti permasalahan penelitian ilmiah ini, maka pembatasan waktu digunakan untuk mempersempit jangka waktu yang dipelajari oleh penulis. Skala waktu penulis untuk upaya ilmiah ini adalah dari 2017-2022.

## 1.3 Perumusan Masalah

Dilihat dari konteks masalah, identifikasinya, kendala masalah yang telah dibahas sebelumnya, dan rumusan masalah yang akan penulis sajikan dalam penelitian ini, **“Bagaimana Implementasi Kebijakan MSRI China Melalui FOCAC di Djibouti Dalam Memenuhi Kepentingan China di Afrika Timur?”**

## 1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulis untuk penelitian ini didasarkan pada identifikasi tantangan yang telah disebutkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan pertahanan China di Djibouti dalam mempengaruhi kepentingannya Kawasan di Afrika Timur.
2. Untuk mengetahui dampak di Kawasan Afrika Timur yang ditimbulkan oleh kebijakan *Maririme Silk Road Initiative* China di Djibouti.

### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang dijelaskan di atas:

1. Aplikasi teoretis penelitian ini adalah untuk menjelaskan konteks stabilitas keamanan regional dan pengaruh strategi pertahanan China di Djibouti, dengan penekanan khusus pada bagaimana kebijakan ini memengaruhi keamanan kawasan Afrika Timur. Dimana hal-hal tersebut juga difokuskan pada ekonomi dan bidang keamanan.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini, diantaranya:
3. Melengkapi persyaratan gelar Sarjana Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pasundan Bandung dengan menghasilkan karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat kelulusan program.
4. Memberikan manfaat sosial, akademik, dan praktis bagi penulis khususnya, serta masyarakat luas;
5. Secara khusus menginformasikan mereka yang tertarik untuk meneliti topik yang tercakup dalam studi, dan berfungsi sebagai sumber bagi mereka yang ingin menyelidiki lebih lanjut Dampak Kebijakan Pertahanan China di Djibouti terhadap Stabilitas bidang Keamanan di Afrika Timur di Maritim Jalan Sutra.